

## PERANCANGAN MODEL RENCANA INDUK PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA BANDUNG

### *Design of Master Plan Building Model for Food Security Department in Bandung City*

Roni Kastaman<sup>1</sup>, Entang Sastraatmadja<sup>2</sup>, dan Asep Dedi Sutrisno<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Staf Akademik Jurusan Teknik & Manajemen Industri Pertanian FTIP - Universitas Padjadjaran, Sumedang 45363, Indonesia, <sup>2</sup>Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, <sup>3</sup>Staf Akademik Jurusan Teknologi Pangan Fakultas Teknik – Universitas Pasundan, Bandung

---

#### ABSTRACT

Four indicators showing the measure of food security *i.e*; (1) availability; (2) accessibility; (3) use and quality; (4) Institution and regulation, are each regionally varied. Hence, a research has been conducted from May to October 2012 using a descriptive approach through odeling system technique to measure food security condition of a region. Bandung - the City that has not any concepts of food security master plan yet, has been observed as the location of study. Supporting mean used for the mapping food security condition and its strategy was a SWOT analysis In which a design model of food security master plan has been put under tests using a proposed food security criteria of the four aspects mentioned. the aspect criteria of availability, accessibility, use and quality, and institution and regulation were observed using 27, 11, 12, and 6 measurement indicators, respectively. Results showed that the establishment of Bandung's food security in year 2012 for availability, accessibility, use and quality aspects were sufficiently secure, whereas for institution and regulation aspects were insufficient. The tested model can therefore be used to arrange a strategy, policy direction, program, and activity that can be implemented to design food security establishment at least 5 years to come.

**Keywords:** SWOT analysis, four aspect criteria of food security, measure indicator

---

#### ABSTRAK

Empat indikator yang menunjukkan ukuran aspek ketahanan pangan, yaitu: 1. Ketersediaan; 2. akses; 3. pemanfaatan dan mutu; 4. kelembagaan dan regulasi pangan sering berbeda-beda di tiap daerah. Untuk mengatasi hal itu pada bulan Mei – Oktober 2012 telah dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui teknik pemodelan sistem untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu daerah. Pada penelitian ini Kota Bandung, yang belum memiliki konsep rencana induk pembangunan ketahanan pangan-diamati sebagai lokasi studi. Alat bantu analisis yang digunakan untuk memetakan kondisi dan strategi ketahanan pangan adalah analisis SWOT. Di sini diuji-cobakan model rancangan rencana induk ketahanan pangan dengan menggunakan model acuan kriteria ketahanan pangan dengan ke-empat aspek di atas. Untuk kriteria aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan kelembagaan pangan diamati berturut-turut dengan menggunakan 27, 11, 12, dan 6 indikator ukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan kota Bandung pada tahun 2012 berturut-turut untuk aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan dan mutu pangan dalam kondisi cukup memadai, Sedang untuk aspek kelembagaan dan regulasi pangan dalam kondisi kurang memadai. Dengan menggunakan model rancangan yang telah diujicobakan dapat dibuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan untuk perencanaan pembangunan ketahanan pangan minimal untuk jangka 5 tahun ke depan.

**Kata kunci:** analisis SWOT, empat kriteria aspek ketahanan pangan, indikator ukur

Diterima: 20 April 2013; Disetujui: 10 Agustus 2013

## PENDAHULUAN

Pangan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 adalah "*segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman*". Sedangkan pengertian ketahanan pangan menurut undang-undang tersebut adalah "*kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan*".

Kota Bandung dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 2.182.661 jiwa (KPU, 2012) membutuhkan kebutuhan pangan yang tinggi mengingat keterbatasan lahan produksi pertanian sehingga kota Bandung hanya mampu memasok sekitar 3,39 % pangan, sedangkan sisanya sebesar 96,61 % harus didatangkan dari luar kota (LPM UNPAD, 2006). Dengan kondisi tersebut ketersediaan pangan bagi kota Bandung merupakan hal yang mutlak dan strategis. Untuk itu diperlukan perencanaan strategis ketahanan pangan yang baik dan berkelanjutan.

Persoalannya adalah kota Bandung belum memiliki rencana induk ketahanan pangan kota yang dapat dijadikan rujukan pembangunan bagi tiap Organisasi Perangkat daerah (OPD), oleh karena itu perlu disusun Rencana Induk (Master Plan atau Grand Design) Ketahanan Pangan yang dapat mengukur kinerja pembangunan bidang tersebut secara periodik.

Rencana induk ketahanan pangan tersebut intinya merupakan bentuk penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah (UU Pangan No.18 tahun 2012, PP No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, PP No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan).

Ada beberapa pokok permasalahan yang terkait dengan rencana induk ketahanan pangan

kota Bandung, yang dibahas dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana merumuskan model untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan ketahanan pangan ?
2. Apakah model rencana induk pembangunan bidang ketahanan pangan yang dibuat dapat memetakan kondisi ketahanan pangan sebenarnya di lapangan ?
3. Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan seperti apa yang dapat direncanakan untuk kondisi pemetaan ketahanan pangan hasil analisis dengan model yang dirancang ?

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran model yang dapat dijadikan contoh dalam merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang ketahanan pangan, yang didasarkan atas hasil pemetaan kondisi ketahanan pangan yang diperoleh dari model tersebut dengan mengambil studi kasus di kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan agar pembangunan Ketahanan Pangan yang komprehensif
2. Sebagai Pedoman Operasi (Rencana Aksi) Ketahanan Pangan, dalam hal ini adalah Kota Bandung, yang dapat dijadikan sebagai instrument perencanaan dan pengendalian bidang ketahanan pangan.
3. Memetakan (*Mapping*) kondisi terkini ketahanan pangan di suatu daerah, dengan menggunakan contoh studi kasus di Kota Bandung.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Model yang dirancang dapat dijadikan contoh rujukan bagi perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan yang lebih terukur secara kuantitatif.
2. Efisiensi dan efektifitas dalam proses perencanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan karena lebih terarah dan terstruktur

## BAHAN DAN METODE

Penelitian menggunakan bahan penelitian berupa data terkait aspek-aspek pengukuran ketahanan pangan dengan menambahkan kriteria kelembagaan ketahanan pangan di daerah. Data primer dalam hal ini dikumpulkan dengan



Indikator untuk masing-masing elemen ketahanan pangan dengan memasukkan unsur kelembagaan, hasil "focus group discussion" dengan pemangku kepentingan ketahanan pangan di kota Bandung adalah seperti yang disajikan pada Tabel 1 – 4.

**Tabel 1. Hasil Pemetaan Kondisi Ketahanan Kota Bandung dari Aspek Ketersediaan Pangan.**

Bobot (1)	Skor (2)	(1) x (2)	Aspek Ketersediaan Pangan
1.37	10	13.70	1. Produksi Pangan Kota Bandung
6.85	50	342.47	2. Pasokan dari eksternal ke internal kota (sembako)
6.85	10	68.49	3. Jembatan timbang
5.48	40	219.18	4. Sarana Transportasi angkutan komoditas
2.74	10	27.40	5. Balai karantina
4.11	10	41.10	6. Stok pangan kota (pemerintah propinsi)
5.48	10	54.79	7. Stok Pangan Kota (Pemerintah Kota)
4.11	10	41.10	8. Stok pangan lumbung kecamatan
5.48	10	54.79	9. Stok pangan lumbung kelurahan
5.48	30	164.38	10. Stok pangan di tingkat pedagang, kelompok, RT
6.85	40	273.97	11. Pasar Induk
4.11	50	205.48	12. Pasar Tradisional
4.11	50	205.48	13. Pasar Moderen / Hypermarket
5.48	10	54.79	14. Subsidi harga pangan
6.85	20	136.99	15. Jumlah penduduk kota/km <sup>2</sup>
1.37	30	41.10	16. Luas panen
1.37	10	13.70	17. Produktivitas
5.48	50	273.97	18. Diversifikasi produk
1.37	20	27.40	19. Sistem irigasi
2.74	30	82.19	20. Teknologi pertanian
2.74	30	82.19	21. Kredit usaha tani
2.74	30	82.19	22. Sarana produksi
1.37	50	68.49	23. Komisi pengawasan pupuk dan pestisida
2.74	50	136.99	24. Iklim
1.37	50	68.49	25. Hama
2.74	50	136.99	26. Penyakit
4.11	50	205.48	27. Bencana
<b>Jumlah</b>		<b>3123.29</b>	<b>Justifikasi : Cukup Memadai</b>
1,000	1800		Tidak Memadai
1,800	2600		Kurang Memadai
2,600	3400		Cukup Memadai
3,400	4200		Memadai
4,200	5000		Sangat Memadai

**Tabel 2. Hasil Pemetaan Kondisi Ketahanan Kota Bandung dari Aspek Akses Pangan.**

Bobot (1)	Skor (1)	(1) X (2)	Aspek Akses Pangan
11.43	40	457.14	1. Pendapatan rata-rata per kapita
11.43	30	342.86	2. Persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk
11.43	40	457.14	3. Harga Pangan (HPP beras) dilihat dari laju inflasi
14.29	50	714.29	4. Ada tidaknya monitoring atas harga komoditas
14.29	50	714.29	5. Sarana dan Prasarana Perhubungan (alat angkut, komunikasi dan transportasi) penunjang distribusi pangan
8.57	10	85.71	6. Volume kendaraan bermotor dikaitkan dengan kondisi Jalan
11.43	50	571.43	7. Intensitas kegiatan sosialisasi dan pembinaanketahanan pangan per tahun per kelurahan (frekuensi)
2.86	30	85.71	8. Tindakan atas kemungkinan adanya pengaruhbencana, konflik dll dalam kurun 1 tahun
5.71	30	171.43	9. Intensitas Banjir per tahun
5.71	50	285.71	10. Intensitas Kekeringan per tahun
5.71	50	285.71	11. Intensitas Gempa per tahun
<b>Jumlah</b>		<b>4171.43</b>	<b>Justifikasi : Memadai</b>

**Tabel 3. Hasil Pemetaan Kondisi Ketahanan Kota Bandung dari Aspek Pemanfaatan dan Mutu Pangan.**

Bobot (1)	Skor (1)	(1) X (2)	Aspek Utilitas / Mutu Pangan
10.87	30	32.09	1. Kecukupan Energi (Rata-rata)
10.87	10	108.70	2. Kecukupan Gizi
8.70	30	260.87	3. Variasi makanan dalam satu minggu/rumah tangga
6.52	10	65.22	4. Kejadian kasus gizi buruk termasuk kasus Keracunan / tahun dalam bentuk persentase
10.87	30	326.09	5. Pelanggaran kasus keamanan pangan dalam 1 tahun
6.52	30	195.65	6. Fasilitas Kesehatan
6.52	30	195.65	7. Layanan Kesehatan
8.70	40	347.83	8. Kecukupan Air Bersih
8.70	40	347.83	9. Sanitasi
6.52	40	260.87	10. Harapan Hidup
8.70	50	434.78	11. Gizi Balita buruk / th
6.52	40	260.87	12. Kematian Bayi
<b>Jumlah</b>		<b>3130.43</b>	<b>Justifikasi : Cukup Memadai</b>

**Tabel 4. Hasil Pemetaan Kondisi Ketahanan Kota Bandung dari Aspek Kelembagaan dan Regulasi Terkait Pangan.**

Bobot (1)	Skor (1)	(1) X (2)	Aspek Kelembagaan Dan Regulasi
17.86	40	714.29	1. Adanya kelembagaan pangan daerah/kota
14.29	20	285.71	2. Berjalan/tidaknnya peran stabilisator pangan (BULOG)
17.86	20	357.14	3. Ada tidaknya regulasi pangan
14.29	20	285.71	4. Koordinasi antar SKPD sesuai tupoksi dalam mendukung ketahanan pangan
17.86	10	178.57	5. Pendataan dan Pemutakhiran data terkait ketahanan pangan sesuai tupoksi SKPD
17.86	20	357.14	6. Implemenetas kebijakan pangan
Jumlah		<b>2178.57</b>	Justifikasi : Kurang Memadai

Keterangan :

Bobot diperoleh dari hasil FGD responden pemangku kepentingan, sementara SKR diperoleh atau capaian kinerja aktual dari data primer (hasil survey) dan data sekunder .

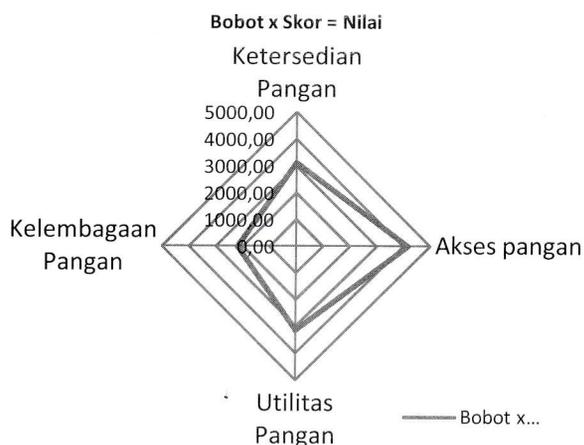
Total penjumlahan untuk seluruh indikator diinterpretasikan berdasarkan nilai range sebagai berikut :

1000	1800	= Tidak Memadai
1800	2600	= Kurang Memadai
2600	3400	= Cukup Memadai
3400	4200	= Memadai
4200	5000	= Sangat Memadai

#### Dasar Pemberian Bobot

Prioritas Bukan Utama	= 1
Prioritas Agak Kurang	= 2
Prioritas Cukup Penting	= 3
Prioritas Penting	= 4
Prioritas Sangat Penting	= 5

Gambaran Tabel 1 – 4 di atas bila dibuat dalam diagram laba-laba adalah sebagai berikut.



**Gambar 2. Pemetaan Ketahanan Pangan Kota Bandung Berdasarkan Skenario Porsi Bobot x Skor untuk Masing-masing Aspek Sama.**

Disini terlihat bahwa kondisi akses pangan di kota Bandung dominan bila dibandingkan dengan 3 aspek lainnya. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa tingkat rata-rata pendapatan penduduk kota Bandung telah memadai untuk mendapatkan akses pangan, dengan rata-rata pendapatan penduduk tahun 2012 sebesar Rp.45,1 juta/ kapita/ tahun atau Rp. 3.578.333,- per kapita / bulan atau di atas tingkat Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bandung sebesar Rp. 1.538.703,- per bulan (LKPJ Walikota Bandung, 2013).

Seandainya ke 4 aspek yang diukur dirata-ratakan nilainya dengan porsi bobot yang sama, maka kondisi ketahanan pangan kota Bandung berada pada posisi cukup memadai. Namun walaupun demikian, hal yang perlu dicermati dari ke 4 aspek adalah aspek kelembagaan dan regulasi terkait ketahanan pangan, termasuk implementasi di dalamnya mengingat untuk aspek ini masih dalam kondisi yang kurang memadai.

**Analisis SWOT Kondisi Ketahanan Pangan Kota Bandung.** Evaluasi internal dan eksternal atas kondisi ketahanan pangan kota Bandung dengan menggunakan metode analisis SWOT dapat menjadi dasar pijakan dalam menyusun strategi dan kebijakan ketahanan pangan kota Bandung dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

**Tabel 5. Faktor Internal Ketahanan Pangan Kota Bandung dari Sisi Kekuatan.**

A. KEKUATAN	
1.	Pasokan dari eksternal ke internal kota Bandung berlimpah
2.	Sarana Transportasi angkutan komoditas mendukung aktivitas ketersediaan pangan di kota Bandung
3.	Keberadaan Pasar yang kuantitasnya sangat memadai
4.	Sebagai kota kuliner kota Bandung memiliki keunggulan dalam diversifikasi produk pangan
5.	Aktivitas pertanian kota yang respon terhadap perubahan lingkungan
6.	Pendapatan rata-rata per kapita mendukung aktivitas ketahanan pangan di tingkat masyarakat
7.	Adanya monitoring komoditas pangan untuk mengantisipasi inflasi karena gejolak harga
8.	Sarana dan Prasarana Perhubungan penunjang distribusi pangan relah mendukung sangat baik
9.	Antisipasi bencana telah dilakukan secara terstruktur dan melembaga
10.	Mayoritas penduduk telah mendapatkan air bersih yang merupakan bagian penting dalam ketahanan pangan
11.	Adanya kelembagaan yang menangani ketahanan pangan secara khusus (melalui Dewan Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan SKPD terkait
12.	Adanya "political will" dari pemerintah pusat hingga pemerintah kota dalam mewujudkan ketahanan pangan yang baik

Hasil analisis pemetaan sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam menyajikan informasi yang sesuai untuk mendeskripsikan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, yang ada di kota Bandung terkait dengan kondisi ketahanan pangannya. Gambaran faktor internal dan eksternal yang diperoleh seperti dalam Tabel 5.

**Tabel 6. Faktor Internal Ketahanan Pangan Kota Bandung dari Sisi Kelemahan.**

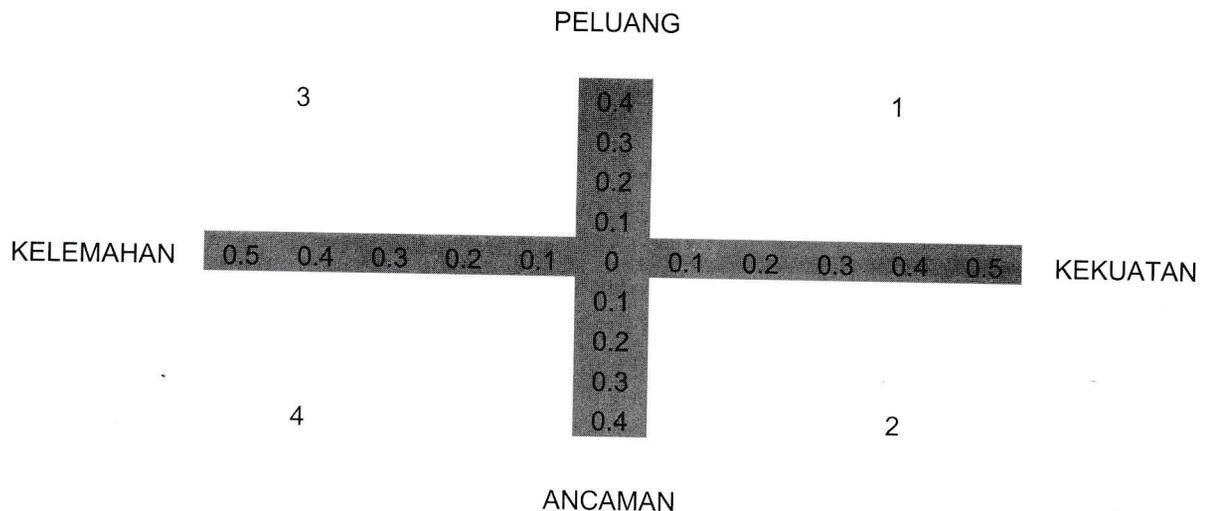
B. KELEMAHAN	
1.	Keterbatasan Produksi pangan Kota Bandung karena terbatasnya lahan pertanian
2.	Keberadaan jembatan timbang sebagai pintu masuk dan keluar pemantauan komoditas kebutuhan pokok bagi warga kota
3.	Keterbatasan balai karantina sementara cakupan luas
4.	Kondisi stok pangan terbatas dibandingkan dengan populasi penduduk
5.	Belum adanya subsidi harga pangan bagi masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu untuk pangan pokok baik beras maupun non beras
6.	Populasi penduduk per km2 padat
7.	Produktivitas pertanian masih rendah
8.	Keberadaan sumber air irigasi bagi pertanian masih terabaikan
9.	Populasi kendaraan bermotor di kota Bandung sudah dalam tahap mengkhawatirkan dibandingkan dengan pertumbuhan jalan maupun transportasi yang bersifat masal
10.	Masih dijumpai kasus gizi baik kecukupannya maupun kualitasnya (ada kasus gizi buruk, maupun keamanan pangan)
11.	Pengetahuan gizi masyarakat masih terbatas
12.	Peran stabilisator pangan belum signifikan
13.	Regulasi pangan yang implementatif masih terbatas
14.	Koordinasi antar SKPD sesuai tupoksi dalam mendukung ketahanan pangan
15.	Pendataan dan Pemutakhiran data terkait ketahanan pangan sesuai tupoksi SKPD
16.	Implemenetasi kebijakan pangan masih terbatas

**Tabel 7. Faktor Eksternal Ketahanan Pangan Kota Bandung dari Sisi Peluang.**

C. PELUANG	
1.	Kerjasama antara wilayah / kawasan terbuka lebar, apalagi di era global saat ini, yang dapat menunjang ketahanan pangan kota
2.	Teknologi informasi yang menunjang diseminasi informasi ketahanan pangan tersedia dalam berbagai bentuk
3.	Standar mutu produk yang bersifat umum / universal (ISO, SNI, Halal Standard) dapat meningkatkan akseptabilitas produk pangan yang menjamin ketahanan pangan
4.	Tersedianya bantuan luar negeri dalam mewujudkan ketahanan pangan (World Food Program, Carbon Trade, FAO programme, WHO Programme dsb.)
5.	Adanya program CSR BUMN dan Swasta yang mulai banyak diimplementasikan di kota Bandung, yang dapat digunakan dalam mendukung ketahanan pangan kota Bandung

**Tabel 8. Faktor Eksternal Ketahanan Pangan Kota Bandung dari Sisi Ancaman.**

D. ANCAMAN	
1.	Membanjir produk luar yang tidak ramah lingkungan sehingga lambat laun membawa beban lingkungan yang berat bagi perkembangan kota
2.	Persaingan global menuntut perubahan regulasi yang bersifat global pula
3.	Budaya konsumerisme di kalangan masyarakat melalui berbagai media, yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan
4.	Kebijakan pembangunan daerah yang berdekatan dengan kota Bandung, yang tidak berkesesuaian dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dapat membawa dampak negatif bagi pembangunan kota Bandung



**Gambar 3. Peta Posisi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Untuk Ketahanan Pangan kota Bandung Saat Ini.**

Informasi hasil evaluasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisis pada tabel matrikulasi SWOT dengan menggunakan pembobotan dan skoring, sehingga diperoleh gambaran seberapa besar derajat Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, yang ada saat ini terkait kondisi ketahanan pangan di kota Bandung (Tabel 9 – 12). Hasilnya menunjukkan bahwa faktor internal berada pada posisi lemah (Kelemahan mendo-

minasi Kekuatan yang ada), sedangkan untuk faktor eksternalnya, unsur peluang masih lebih mendominasi daripada ancaman yang ada.

Posisi ketahanan pangan kota Bandung bila digambarkan pada kuadran strategi berada pada kuadran 3 (Gambar 3.), yakni harus berupaya untuk mengubah strategi dari kondisi strategi yang selama ini dilakukan.

**Tabel 9. Hasil Perhitungan Nilai Skor Bobot Aspek Kekuatan.**

NO	FAKTOR INTERNAL KEKUATAN	Kode	Urut	UB	AB	PBI	SF	NSB
1	Pasokan dari eksternal ke internal kota Bandung berlimpah	K1	1	5	0.11	0.06	5	0.28
2	Sarana Transportasi angkutan komoditas mendukung aktivitas ketersediaan pangan di kota Bandung	K2	2	4	0.09	0.04	4	0.18
3	Keberadaan Pasar yang kuantitasnya sangat memadai	K3	1	5	0.11	0.06	5	0.28
4	Sebagai kota kuliner kota Bandung memiliki keunggulan dalam diversifikasi produk pangan	K4	2	4	0.09	0.04	5	0.22
5	Aktivitas pertanian kota yang respon terhadap perubahan lingkungan	K5	5	1	0.02	0.01	3	0.03
6	Pendapatan rata-rata per kapita mendukung aktivitas ketahanan pangan di tingkat masyarakat	K6	2	4	0.09	0.04	4	0.18
7	Adanya monitoring komoditas pangan untuk mengantisipasi inflasi karena gejolak harga	K7	2	4	0.09	0.04	5	0.22
8	Sarana dan Prasarana Perhubungan penunjang distribusi pangan relah mendukung sangat baik	K8	2	4	0.09	0.04	5	0.22
9	Antisipasi bencana telah dilakukan secara terstruktur dan melembaga	K9	5	1	0.02	0.01	3	0.03
10	Mayoritas penduduk telah mendapatkan air bersih	K10	2	4	0.09	0.04	4	0.18
11	Adanya kelembagaan yang menangani ketahanan pangan secara khusus (melalui Dewan Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan SKPD terkait	K11	1	5	0.11	0.06	4	0.22
12	Adanya political will dari pemerintah pusat hingga pemerintah kota dalam mewujudkan ketahanan pangan yang baik	K12	2	4	0.09	0.04	4	0.18
				45	1.00	0.50		2.22

**Tabel 10. Hasil Perhitungan Nilai Skor Bobot Aspek Kelemahan.**

NO	KELEMAHAN	Kode	urut	UB	AB	PBI	SF	NSB
1	Keterbatasan Produksi pangan Kota Bandung karena terbatasnya lahan pertanian	L1	5	1	0.02	0.01	5	0.05
2	Keberadaan jembatan timbang sebagai pintu masuk dan keluar pemantauan komoditas kebutuhan pokok bagi warga kota	L2	1	5	0.09	0.05	5	0.23
3	Keterbatasan balai karantina sementara cakupan luas	L3	4	2	0.04	0.02	5	0.09
4	Kondisi stok pangan terbatas dibandingkan dengan populasi penduduk	L4	3	3	0.06	0.03	5	0.14
5	Belum adanya subsidi harga pangan bagi masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu untuk pangan pokok baik beras/ non beras	L5	2	4	0.07	0.04	5	0.19
6	Populasi penduduk per km2 padat	L6	1	5	0.09	0.05	4	0.19
7	Produktivitas pertanian masih rendah	L7	5	1	0.02	0.01	5	0.05
8	Keberadaan sumber air irigasi bagi pertanian masih terabaikan	L8	5	1	0.02	0.01	4	0.04
9	Populasi kendaraan bermotor di kota Bandung sudah dalam tahap mengkhawatirkan dibandingkan dengan pertumbuhan jalan maupun transportasi yang bersifat masal	L9	3	3	0.06	0.03	5	0.14
10	Masih dijumpai kasus gizi baik kecukupannya maupun kualitasnya (ada kasus gizi buruk, maupun keamanan pangan)	L10	3	3	0.06	0.03	5	0.14
11	Pengetahuan gizi masyarakat masih terbatas	L11	3	3	0.06	0.03	5	0.14
12	Peran stabilisator pangan belum signifikan	L12	2	4	0.07	0.04	4	0.15
13	Regulasi pangan yang implementatif masih terbatas	L13	1	5	0.09	0.05	4	0.19
14	Koordinasi antar SKPD sesuai tupoksi dalam mendukung ketahanan pangan	L14	2	4	0.07	0.04	4	0.15
15	Pendataan dan Pemutakhiran data terkait ketahanan pangan sesuai tupoksi SKPD	L15	1	5	0.09	0.05	5	0.23
16	Implemenetasi kebijakan pangan masih terbatas	L16	1	5	0.09	0.05	4	0.19
				54	1.00	0.50		2.28

**Tabel 11. Hasil Perhitungan Nilai Skor Bobot Aspek Peluang.**

EKSTERNAL								
PELUANG								
		K	Urut	UB	AB	PBE	SF	NSB
1	Kerjasama antara wilayah / kawasan terbuka lebar, apalagi di era global saat ini, yang dapat menunjang ketahanan pangan kota	P1	2	4	0.21	0.11	4	0.42
2	Teknologi informasi yang menunjang diseminasi informasi ketahanan pangan tersedia dalam berbagai bentuk	P2	1	5	0.26	0.13	4	0.53
3	Standar mutu produk yang bersifat umum / universal (ISO, SNI, Halal Standard) dapat meningkatkan akseptabilitas produk pangan yang menjamin ketahanan pangan	P3	2	4	0.21	0.11	4	0.42
4	Tersedianya bantuan luar negeri dalam mewujudkan ketahanan pangan (World Food Program, Carbon Trade, FAO programme, WHO Programme dsb.)	P4	3	3	0.16	0.08	4	0.32
5	Adanya program CSR BUMN dan Swasta yang mulai banyak diimplementasikan di kota Bandung, yang dapat digunakan dalam mendukung ketahanan pangan kota Bandung	P5	3	3	0.16	0.08	5	0.39
				19	1.00	0.50		2.08

**Tabel 12. Hasil Perhitungan Nilai Skor Bobot Aspek Ancaman.**

NO	ANCAMAN	Kode	Urut	UB	AB	PBE	SF	NSB
1	Membanjir produk luar yang tidak ramah lingkungan sehingga lambat laun membawa beban lingkungan yang berat bagi perkembangan kota	A1	1	5	0.28	0.14	4	0.56
2	Persaingan global menuntut perubahan regulasi yang bersifat global pula	A2	2	4	0.22	0.11	3	0.33
3	Budaya konsumerisme di kalangan masyarakat melalui berbagai media, yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	A3	1	5	0.28	0.14	4	0.56
4	Kebijakan pembangunan daerah yang berdekatan dengan kota Bandung, yang tidak berkesesuaian dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dapat membawa dampak negatif bagi pembangunan kota Bandung	A4	2	4	0.22	0.11	3	0.33
				18	1.00	0.50		1.78

Keterangan :

Urutan : menyatakan urutan bobot menurut panel pakar yang menilai

Skor Faktor : 1 = Sangat lemah; 2 = Lemah; 3 = Sedang; 4 = Kuat; 5 = Sangat kuat

K = Kode Kekuatan (K), Kelemahan (L), Peluang (P) dan Ancaman (A); UB = Urutan Bobot; AB = Angka Bobot; PBI = Porsi Bobot Faktor Internal; PBE = Porsi Bobot Faktor Eksternal; SF = Skor Faktor; NSB = Nilai Skor Bobot

Menurut Bachaddiah (2011) Pada posisi "Kuadran 3 organisasi mengalami kelemahan dalam berbagai hal ( internal ), sehingga peluang yang menguntungkan sulit dicapai. Sehingga strategi yang tepat digunakan adalah konsolidasi, perbaikan, mengubah cara pandang serta menghilangkan penyebab masalah agar ancaman dapat dihindari" (Bachaddiah, 2011)

**Analisis Rencana Strategi dan Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Bandung.** Strategi dan kebijakan terkait kondisi ketahanan pangan kota Bandung saat ini dapat dibuat berdasarkan informasi hasil analisis SWOT di atas. Strategi dan kebijakan yang dimaksud adalah pada Tabel 13.

**Implikasi Program di Tingkat OPD Terkait Ketahanan Pangan.** Untuk mengembangkan program, kegiatan dan OPD terkait dengan strategi dan kebijakan yang dapat ditempuh dengan membuat matrix keterkaitan program dan kegiatan, yang dapat mendukung aktivitas pendukung strategi

tersebut. Beberapa OPD yang memiliki peran penting terkait ketahanan pangan di kota Bandung berdasarkan matrix relasi adalah sebagai berikut :

1. Bapeda
2. Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya
5. BPLH
6. Dinas Bina Marga dan Pengairan
7. Dinas KUKM Indag
8. Badan Kesbanglinmas
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
13. BPS
14. BPP&KB dan
15. Dinas Pendidikan

Contoh bentuk program yang dapat dibuat adalah pada Tabel 14.

## KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Model kriteria, indikator untuk mengukur kinerja ketahanan pangan yang telah dibuat, berdasarkan hasil uji coba dapat diaplikasikan untuk proses perencanaan strategis, penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan keterlibatan OPD pembangunan ketahanan pangan di kota Bandung
2. Model rencana induk pembangunan bidang ketahanan pangan yang dibuat dapat digunakan untuk memetakan kondisi ketahanan pangan sebenarnya di lapangan
3. Beberapa strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan dapat disusun secara komprehensif

dengan mengintegrasikan tugas pokok dan fungsi OPD terkait pembangunan ketahanan pangan

4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Peningkatan koordinasi dan peran OPD terkait dalam merumuskan rencana strategisnya
- b. Perlu data dan updating data berkesinambungan.
- c. Untuk mengimplementasikan model Rencana Induk Ketahanan Pangan yang telah dikaji dalam penelitian ini diperlukan pengembangan model lebih lanjut dalam bentuk bentuk perangkat lunak sehingga permasalahan yang dihadapi dapat distrukturkan dan memudahkan dalam analisis serta serta pengambilan keputusan

**Tabel 13. Strategi dan Kebijakan Berdasarkan Kelemahan dan Peluang.**

No	Strategi	Kebijakan
1	Peningkatan koordinasi dan peran SKPD terkait dengan merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan Ketahanan pangan dengan penyediaan data dan updating data berkesinambungan berbasis teknologi informasi yang terkini	Optimalisasi Perda / Perwal / SK / Walikota terkait koordinasi lintas SKPD dengan juga memanfaatkan sistem informasi terpadu (satu atap) untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
2	Pemanfaatan bantuan melalui kerjasama luar negeri untuk penguatan standar mutu pangan, keamanan pangan dan optimalisasi pemanfaatan balai karantina	Adanya MOU kerjasama lembaga terkait ketahanan pangan baik di dalam dan luar negeri
3	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman gizi untuk masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi	Adanya pedoman sosialisasi dan media pertukaran informasi terkait gizi dan ketahanan pangan untuk masyarakat
4	Revitalisasi jembatan timbang sebagai sarana pendataan lalu lintas komoditas antar wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pendukung aksesibilitas informasi ketahanan pangan yang efektif dan efisien	1. Pembangunan jembatan timbang di titik masuk dan keluar kota Bandung untuk pemantauan arus keluar masuk komoditas dari dan ke kota Bandung 2. Adanya regulasi yang mengatur setiap perusahaan distribusi dan retailer harus melaporkan lalu lintas pasokan dan permintaan/konsumsi bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat
5	Pembangunan lumbung pangan daerah (kota, Kecamatan, kelurahan) dengan melibatkan kerjasama swasta dan BUMN melalui CSR nya untuk menjamin adanya stok pangan yang memadai bagi masyarakat	Adanya regulasi yang mengharuskan di tingkat Rumah Tangga, Kelurahan, Kecamatan dan Kota untuk membangun lumbung pangan
6	Penguatan lembaga stabilisasi pangan dengan dukungan regulasi yang implementatif sehingga dapat mengantisipasi ketidakstabilan dalam aspek ketahanan pangan dari aspek spekulasi	Regulasi terkait lembaga stabilisator pangan daerah
7	Pengendalian populasi penduduk dengan melibatkan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri	Regulasi bidang kependudukan, baik terkait dengan Keluarga Berencana (KB) dan sistem Insentif bagi yang mengikuti program KB
8	Penguatan kerjasama antar wilayah untuk menunjang produksi dan stok pangan	MOU kerjasama antar wilayah baik dalam pemenuhan stok pangan maupun kemudahan dalam menyewa atau membeli lahan untuk kegiatan pertanian kota Bandung
9	Penanganan masalah gizi dan keamanan pangan terpadu di tiap kecamatan dengan koordinasi antar SKPD terkait dengan memanfaatkan dukungan lembaga dalam dan luar negeri	Pendataan kantong-kantong kemiskinan dan daerah dengan masalah gizi dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat di daerah yang bermasalah
10	Pemberian subsidi pangan dalam jangkauan lebih luas (tidak hanya untuk raskin saja)	Regulasi subsidi pangan bagi masyarakat, baik yang mengatur tata niaga, harga dan pelanggaran atas keamanan penyediaan pangan bagi masyarakat
11	Pembatasan populasi kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan pengembangan berbagai alternatif moda transportasi yang sifatnya masal	Regulasi terkait pajak progressive, pembatasan umur kendaraan, pengembangan moda transportasi masal
12	Peningkatan produktivitas lahan pertanian kota Bandung dengan intensifikasi, diversifikasi dengan memanfaatkan semua potensi ruang terbuka yang ada untuk kegiatan pertanian dan penghijauan	Regulasi terkait pemanfaatan ruang terbuka dan terlantar di dalam kota untuk kegiatan optimalisasi pertanian kota
13	Optimalisasi saluran irigasi dan drainage perkotaan dalam mendukung ketersediaan air bagi pertanian dan masyarakat	Regulasi terkait perlindungan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi dan drainage perkotaan

**Tabel 14. Contoh Program OPD Terkait Ketahanan Pangan.**

No	OPD	Kriteria Pendukung Ketahanan Pangan
1	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah dan Luar Biasa
2	Kesehatan	Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
3	Bina Marga & Pengairan	Pembangunan & Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengendalian Banjir Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4	Tata Ruang & Cipta Karya	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lingkungan Sehat Perumahan Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5	Bapeda	Pengembangan Data/Informasi Kerjasama Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Sosial dan Budaya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
6	Perhubungan	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7	BPLH	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Pengendalian Polusi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengawasan dan Penertiban Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
8	Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja
9	Kesbanglinmas	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
10	Pertanian & Ketahanan Pangan	Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengembangan Budidaya Perikanan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

**Tabel 14. Lanjutan.**

No	OPD	Kriteria Pendukung Ketahanan Pangan
11	KUKM Indag Perdagangan	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
	Industri	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Penataan Struktur Industri
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12	Infokom	
13	BPPKB	
14	Statistik (BPS) / Non OPD	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapeda Kota Bandung dan Kepala Bagian Ekonomi Bapeda Kota Bandung, yang telah memberikan dukungan bagi terlaksananya penelitian, baik moril maupun materil hingga selesainya penelitian tentang "Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung" ini dengan baik. Pada kesempatan ini juga tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran, yang telah memberikan dukungan fasilitas penelitian bagi para peneliti selama kegiatan ini berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembangunan di Indonesia, khususnya kota Bandung di masa yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

Bachaddiah. 2011. Analisis SWOT. 30 April 2011. Diakses melalui halaman situs web: <http://bachaddiah.blogspot.com/2011/04/analisis-swot.html>  
FANTA. 2003. Food Access Indicator Review. Food and Nutrition Technical Assistance Project (FANTA) Academy for Educational

Development. 1825 Connecticut Ave., NW Washington  
KPU. 2012. Data Agregat Kependudukan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. website: [kpu.go.id](http://kpu.go.id). Diakses dari halaman situs : <http://data.kpu.go.id/dak2.php>  
LKPJ Walikota Bandung. 2013. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Bandung Tahun 2012. Sekretariat daerah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung.  
LPM UNPAD. 2006. Penyusunan Rencana Pembangunan Pertanian Perkotaan. Laporan Penelitian. Kerjasama Penelitian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Bandung dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran.  
Rangkuty, F. 1997. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Gramedia Pustaka Utama. Indonesia  
Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan  
Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan  
Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan  
Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan